



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar-Sulawesi Selatan

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai maupun permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan dalam melaksanakan program dan kegiatan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran OPD dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terima Kasih.

Makassar, Februari 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sulawesi Selatan

Ttd.

ANDI ARWIN AZIS S.STP., M.M  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19760105 199511 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Grafik.....	vii
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1. Kedudukan, Tuga, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
1.2. Aspek Strategis.....	8
1.3. Isu Strategis Dalam Penyelenggara Tugas Pokok Dan Fungsi.....	10
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	10
1.5. Sistematika Laporan.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Rencana Stratergis 2024-2026.....	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
2.4. Indikator Kinerja Perangkat daerah (RPD).....	15
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran 2024.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
3.1. Pengukuran Kinerja 2024.....	18
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	19
<b>Sasaran Strategis 1.....</b>	<b>20</b>
A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi.....	20
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	26
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional.....	27
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	30
E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
F. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	32
<b>Sasaran Strategis 2.....</b>	<b>34</b>
A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi.....	34
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	53

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional.....	55
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	59
E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	62
F. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	68
3.3. Capaian Kinerja Lain.....	71
3.3. Realisasi Anggaran.....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	76
4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	76
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	77
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Eselon II.....	79
Lampiran 2 Surat Keputusan Penetapan IKU.....	81
Lampiran 3 Realisasi Anggaran Per Sasaran.....	85

## DAFTAR TABEL

			Halaman
1	Tabel I-1	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Golongan .....	6
2	Tabel I-2	Pegawai ASN Satpol Berdasarkan Pendidikan.....	6
3	Tabel I-3	Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	7
4	Tabel I-4	Pegawai Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja.....	7
	Tabel I-5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	8
5	Tabel II-1	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tahun 2024.....	13
6	Tabel II-2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
	Tabel II-3	Indikator Kinerja Utama.....	14
	Tabel II-4	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (RPD).....	15
	Tabel II-5	Program dan Anggaran Tahun 2024.....	16
7	Tabel III-1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	18
8	Tabel III-2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	19
9	Tabel III-3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	20
10	Tabel III-4	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.....	20
11	Tabel III-5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	21
12	Tabel III-6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	21
13	Tabel III-7	Rata-Rata Capaian Kinerja Program.....	22
14	Tabel III-8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	22
	Tabel III-9	Rincian LHP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.....	22
15	Tabel III-10	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	24
16	Tabel III-11	ASN Satpol PP Dengan Nilai SKP Kategori Baik.....	24
17	Tabel III-12	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	24
18	Tabel III-13	Rata-Rara Capaian Kinerja Program .....	25
19	Tabel III-14	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir.....	26
20	Tabel III-15	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024, Jangka Menengah dan Nasional.....	27
21	Tabel III-16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
22	Tabel III-17	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	34
23	Tabel III-18	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	34
24	Tabel III-19	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum Se-Sulawesi Selatan 2023-2024.....	35
25	Tabel III-20	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	37
26	Tabel III-21	Data Trantibum Kabupaten/Kota Se-Sulsel Tahun 2024.....	37
27	Tabel III-22	Data Pelaksanaan Kegiatan Trantibum Satpol PP Prov. Sulsel 2024.....	38
28	Tabel III-23	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	42
29	Tabel III-24	Data Warga Terdampak Penegakan Perda/Perkada.....	42
30	Tabel III-25	Data Penegakan Perda Se-Sulawesi Selatan.....	45
31	Tabel III-26	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	46
32	Tabel III-27	Data Jumlah Korban Bencana Se-Sulsel Tahun 2023.....	46

33	Tabel III-28	Data Jumlah Korban Bencana Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	47
34	Tabel III-29	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	48
35	Tabel III-30	Data Jumlah Bencana Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	48
36	Tabel III-31	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	49
37	Tabel III-32	Data Kejadian Kebakaran Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024	49
38	Tabel III-33	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	51
39	Tabel III-34	Pos Pelayanan Kebakaran Kabupaten/Kota.....	51
40	Tabel III-35	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir.....	53
41	Tabel III-36	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024, Jangka Menengah dan Nasional.....	55
42	Tabel III-37	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	62
43	Tabel III-38	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
44	Tabel III-39	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	64
45	Tabel III-40	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
46	Tabel III-41	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
47	Tabel III-42	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	66
48	Tabel III-43	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	67
49	Tabel IV-1	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	75

## DAFTAR GRAFIK

		<b>Halaman</b>
1	Grafik I-1 Struktur Organisasi	5
2	Grafik III-1 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	27
3	Grafik III-2 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	27
4	Grafik III-3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	28
5	Grafik III-4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	29
6	Grafik III-5 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	29
7	Grafik III-6 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	55
8	Grafik III-7 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	56
9	Grafik III-8 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	56
10	Grafik III-9 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	57
11	Grafik III-10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	57
12	Grafik III-11 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	58
13	Grafik III-12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah.....	58

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
1	Gambar 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Urusan Trantibum Linmas SulSel..... 36
2	Gambar 2	Aplikasi Siap Tertib SulSel..... 36
3	Gambar 3	Pelaksanaan Patroli..... 39
4	Gambar 4	Pelaksanaan Penertiban..... 40
5	Gambar 5	Pelaksanaan Pengamanan/Pengendalian Massa..... 40
6	Gambar 6	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM..... 40
7	Gambar 7	Pendatangan dan Pemberdayaan Linmas..... 41
8	Gambar 8	Pemantauan Pemilu dan Pilkada 2024..... 41
9	Gambar 9	Rapat Perlindungan Masyarakat dan Tindak Lanjut Kegiatan ..... 41
10	Gambar 10	Sosialisasi dan Monitoring Penegakan Peraturan Daerah..... 43
11	Gambar 11	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 ..... 43
12	Gambar 12	Pengawasan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015..... 44
13	Gambar 13	Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah No Tahun 2021 ..... 44
14	Gambar 14	Pengikutsertaan Diklat PPNS..... 44
15	Gambar 15	Rapat Terkait Pencapaian Respon Time Kebakaran dan Penyerahan Mobil Damkar..... 50
16	Gambar 16	Monitoring Sarana Prasaran Damkar Di Kab/Kota..... 52
17	Gambar 17	Penghargaan Arsiparis..... 71
18	Gambar 18	Penghargaan Korpri..... 71
16	Gambar 19	Pasukan Reaksi Cepat (PRC) Satpol PP ..... 72
20	Gambar 20	Aplikasi Siap Tertib Sulsel ..... 73
21	Gambar 21	Danton, Danki dan PTI ..... 73

# BAB I

## PENDAHULUAN

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Aspek Strategis
3. Isu Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
4. Maksud dan Tujuan
5. Sistematika Laporan



# BAB I

## PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument yang menjadikan pemerintah akuntabel, transparansi, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; rangsangan partisipasi masyarakat pada peran pembangunan; serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategi (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*), Penetapan Kinerja (*performance agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (*performance accountability report*) yang secara sistematis mengarahkan pemerintah pada capaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya, sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya hal ini merupakan upaya dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan bagian dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal di atas, Satuan Polisi Pamong Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja.

## **1.1. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1.1.1. Kedudukan Organisasi**

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

### **1.1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 dan 256 dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta dengan memperhatikan lingkungan strategis sebagai berikut :

#### **1) Tugas Pokok**

Satpol PP mempunyai tugas :

- a) menegakkan Perda dan Perkada;
- b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

#### **2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

- e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewenangan
- Polisi Pamong Praja berwenang :
- a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
  - d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

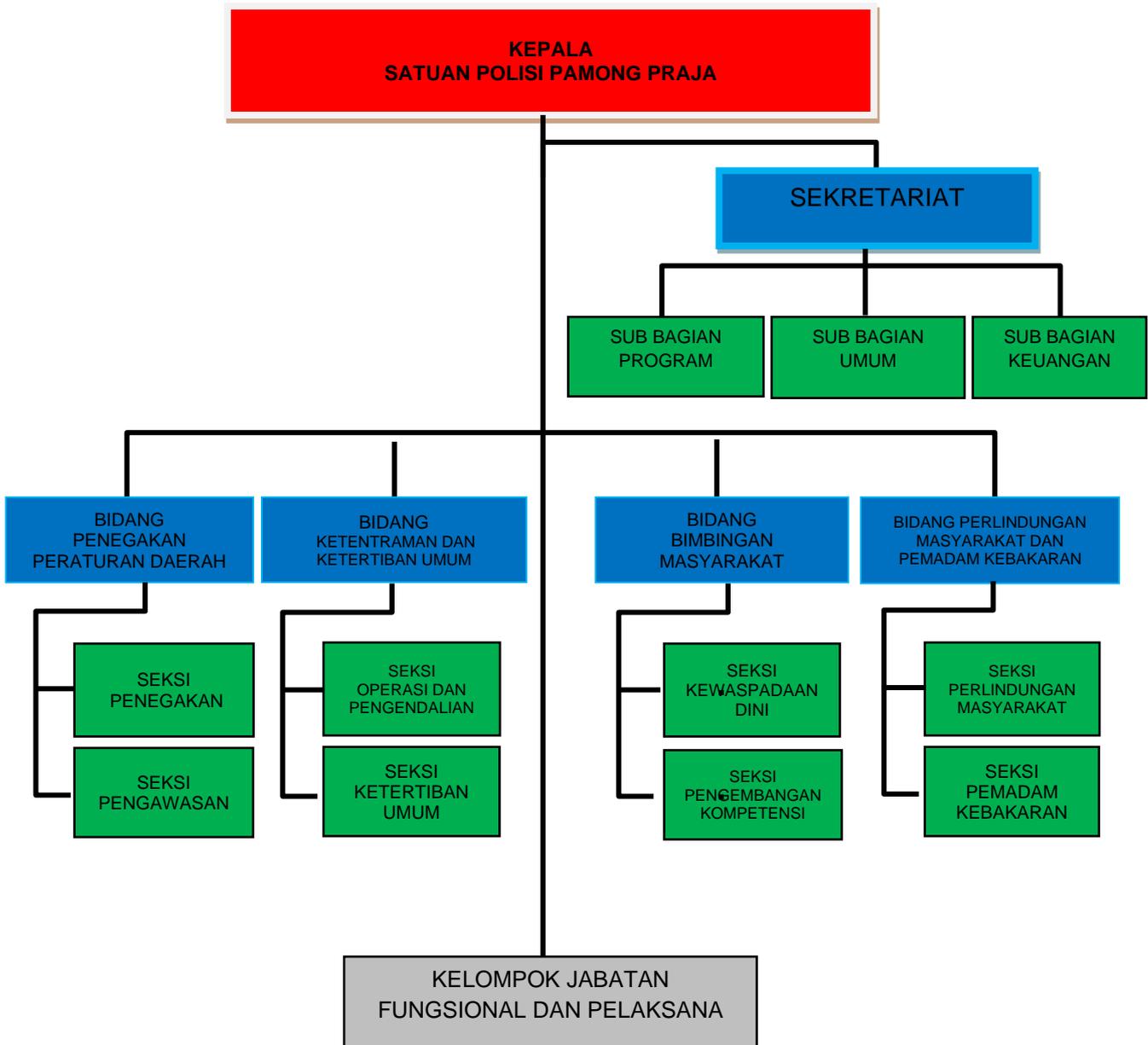
### **1.1.3. Struktur Organisasi**

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka dibentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 6 Pasal 11 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum; dan
  3. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  1. Seksi Penegakan; dan
  2. Seksi Pengawasan;
4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
  2. Seksi Ketertiban Umum;
5. Bidang Bimbingan Masyarakat;
  1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan

2. Seksi Pengembangan Kompetensi;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
  1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  2. Seksi Pemadam Kebakaran;
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Grafik I-1  
Struktur Organisasi



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh Sumber Daya antara lain sebagai berikut :

Tabel 1-1  
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	1	12	2	15
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	7	3	10
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	4	9	4	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	1	8	1	10
5	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	-	-	12	2	14
6	Fungsional Tertentu	-	13	47	13	73
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>19</b>	<b>95</b>	<b>25</b>	<b>140</b>

Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP

Tabel 1-2  
Pegawai ASN Satpol Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						JUMLAH
		SD	SLTP	SMA	Diplo ma	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	3	2	6	4	15
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	3	-	4	3	10
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	9	-	4	4	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	2	-	8	-	10
5	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	-	-	5	-	9	-	14
7	Fungsional Tertentu	-	-	24	3	39	7	73
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>18</b>	<b>140</b>

Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP

Tabel 1-3  
Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Perempuan	Laki-laki	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	2	9	11
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	14	59	73
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	8	42	50
TOTAL		24	116	140

*Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP*

Tabel 1-4  
Pegawai Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Perempuan	Laki-laki	
1	Pegawai Non ASN	62	422	484

*Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP*

## 1.2. ASPEK STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan/sasaran.

Faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD antara lain :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi SULSEL yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/ kota, masyarakat, dan stake holders belum optimal;
4. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus. Dukungan anggaran dan kerjasama dengan mitra kerja/ instansi terkait sangat diperlukan.

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan tersebut, maka untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

Tabel 1-5  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Sumber Daya dalam Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib	Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban Umum)	Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus yang berjenjang dan kontiniu serta peningkatan sarana dan prasarana
			Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam penegakan PERDA, PERKADA
			Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah secara aktif
			Peningkatan Sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada seluruh masyarakat
		Meningkatkan Kerjasama antar Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Upaya Peningkatan Mitigasi Bencana dan Penanganan Bencana Daerah	Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan OPD Terkait dan Kabupaten /Kota terkait Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
		Meningkatkan Sinergitas antar Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholder dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Dampak Bencana Kebakaran	Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Instansi Vertical terkait Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran

Sumber Data : Renstra Satpol PP Tahun 2024-2026

Strategi yang akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya dalam Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan;
2. Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban Umum);
3. Meningkatkan Kerjasama antar Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Upaya Peningkatan Mitigasi Bencana dan Penanganan Bencana Daerah;
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Dampak Bencana Kebakaran.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus yang berjenjang dan kontiniu serta peningkatan sarana dan prasarana;

3. Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam penegakan PERDA, PERKADA;
4. Melaksanakan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah secara aktif;
5. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain di daerah perbatasan;
6. Peningkatan Sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada seluruh masyarakat;
7. Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah secara aktif;
8. Peningkatan Sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada seluruh masyarakat;
9. Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan OPD Terkait dan Kabupaten /Kota terkait Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
10. Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Instansi Vertical terkait Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran;
11. Membuat Memorandum Of Understanding (MOU) dengan kabupaten/kota dan stakeholder terkait. Untuk meretas persoalan kewenangan dan hierarki.

### **1.3. ISU STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Mendukung perwujudan tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's
2. Peningkatan peran aktif Satuan Linmas dalam mendukung "One Agency One Inovatif" sebagai Kesiapan meyongsong Target Nasional Pemerintahan Kelas Dunia
3. Pilkada Serentak
4. Tenaga Pengaman Terpadu yang disatu pintukan pada Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDM
6. Peningkatan Saran dan Prasarana
7. Peraturan Daerah Ketenteraman Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Selatan
8. TIM penanggulangan Kebencanaan Terpadu

### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menilai sejauh mana keberhasilan capaian kinerja diperoleh pada akhir periode.

Pelaporan Kinerja memiliki dua tujuan utama yaitu :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai :

- 1 Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban atas hasil capaian kinerja yang berhasil dicapai selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2024.
- 2 Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2024 yang merupakan Laporan Kinerja tahun pertama RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024-2026 dan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya perbaikan kinerja tahun selanjutnya.
- 3 Untuk setiap *performance gap* (celah kinerja) yang ditemukan dalam manajemen sebagai rumusan strategis dalam pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

## 1.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

### Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran Berisi data-data lainnya yang diperlukan

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2024-2026
2. Perjanjian Kinerja 2024
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (RPD)
5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 dan 256 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya, dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja
2. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja periode Renstra tahun 2024-2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja di tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II – 1  
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
<b>Tujuan 1 :</b> Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan (IKU)	BB Indeks
<b>Sasaran Strategis 1 :</b> Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (IKU)	Rata-rata Capaian Kinerja Program	100%
<b>Tujuan 2 :</b> Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	100%
<b>Sasaran Strategis 2 :</b> Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota (IKU)	Presentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum) (IKU)	100%

*Sumber Data : Renstra Satpol PP 2024-2026*

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II – 2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	BB
2	Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100%
		Persentase Penurunan Korban Bencana	100%
		Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	100%

Sumber Data : Perjanjian Kinerja 2024

## 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II – 3  
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh APIP
2	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Trantibum dikali 100 persen
3	Persentase Penurunan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Tahun Lalu dikurangi Jumlah Korban Bencana Tahun Berjalan dibagi Jumlah Korban Bencana Tahun Lalu di tambah Jumlah Korban Bencana Tahun Berjalan dikali 100 persen
4	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani dibagi Jumlah Korban Bencana dikali 100 persen

Sumber Data : SK IKU 2024

## 2.4. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (RPD)

Tabel II – 4  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah (RPD)

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Nilai SAKIP OPD <b>(IKU)</b>	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh APIP
2.	Rata Rata Capaian Kinerja Program	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Program}}{\text{Jumlah Program}} \times 100 \%$
3.	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan LHP}} \times 100 \%$
4.	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	$\frac{\text{Jumlah ASN berkinerja baik dan sangat baik}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100 \%$
5.	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator Kinerja Program}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100 \%$
6.	Presentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	$\frac{\text{Jumlah Gangguan K3 Tahun Lalu} - \text{Jumlah Gangguan K3 Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Gangguan K3 Tahun Lalu} + \text{Jumlah Gangguan K3 Tahun Berjalan}} \times 100 \%$
7.	Presentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum) <b>(IKU)</b>	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100 \%$
8.	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada (SPM)	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani}}{\text{Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan}} \times 100 \%$
9.	Persentase Penurunan Korban Bencana <b>(IKU)</b>	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Tahun Lalu} - \text{Jumlah Korban Bencana Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Korban Bencana Tahun Lalu} + \text{Jumlah Korban Bencana Tahun Berjalan}} \times 100 \%$
10.	Persentase Korban Bencana yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100 \%$
11.	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate <b>(IKU)</b>	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran}} \times 100 \%$
12.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran Kab/Kota}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Kab/Kota}} \times 100 \%$

Sumber Data : Renstra Satpol PP 2024-2026

## 2.4. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah DPA tahun 2024, yang terdiri dari 4 (empat) program sebagai berikut :

Tabel II – 5  
Program dan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.255.825.552
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.883.828.200
3	Program Penanggulangan Bencana	315.699.600
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	130.225.300
	<b>Jumlah</b>	<b>49.585.578.652</b>

Sumber Data : DPA Satpol PP 2024

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja 2024
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Capaian Kinerja Lain
4. Realisasi Anggaran



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka sebagai wujud tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

*Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{(1)}}{\text{Rencana}^{(2)}} \times 100\%$$

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{(2)} - (\text{Realisasi}^{(1)} - \text{Rencana}^{(1)}))}{\text{Rencana}^{(2)}} \times 100\%$$

### 3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran Renstra. Pencapaian terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III-2  
Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan (IKU)	BB	BB	100%
2	Rata-rata Capaian Kinerja Program	100%	88,10%	88,10%
3	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	79,32%	100%	126,07%
4	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100,42 (nilai)	100 (nilai)	99,58%
5	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	82,96 (nilai)	80 (nilai)	96,43%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	100%	100%	100%
2	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (IKU)	100%	100%	100%
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	100%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Korban Bencana (IKU)	92%	100%	108,70%
5	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%	100%
6	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate (IKU)	93%	100%	107,53%
7	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	38%	40%	105,26%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sebanyak 4 (empat) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 4 (empat) indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91% atau kriteria **“Sangat Tinggi”**.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran dijabarkan sebagai berikut :

## Sasaran Strategis 1

### Meningkatnya Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) dan 4 (empat) indikator Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

#### A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” adalah sebagai berikut :

Tabel III-3  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan (IKU)	BB	BB	100%
2	Rata-rata Capaian Kinerja Program	100%	88,10%	88,10%
3	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	79,32%	100%	126,07%
4	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100,42 (nilai)	100 (nilai)	99,58%
5	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	82,96 (nilai)	80 (nilai)	96,43%

#### 1. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan (IKU)

Tabel III-4  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	BB	BB	100%

Nilai Sakip pada tahun 2024 adalah 75,45 point atau kategori BB (Sangat Baik) sehingga realisasi capaian kinerja Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 100%, capaian kinerja tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Nilai Sakip bersumber dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil evaluasi Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023/2024 seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III-5  
Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi	
			Tahun 2022/2023	Tahun 2023/2024
A	Perencanaan Kinerja	30	23,10	24,00
B	Pengukuran Kinerja	30	22,80	22,80
C	Pelaporan Kinerja	15	10,20	9,90
D	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	18,50	18,75
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>74,60</b>	<b>75,45</b>

Sumber Data : LHE Inspektorat Prov. Sulsel Nomor 700.04/2446/A.I/Itprov

Dari tabel di atas, bahwa dari tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi kenaikan 0,85 poin dari 74,60 menjadi 75,45. Kenaikan pada perencanaan kinerja namun terjadi penurunan pada pelaporan kinerja. Hal ini perlu perlu mendapatkan perhatian lebih dikarenakan kenaikan nilai poin sangat rendah oleh karena itu telah dilakukan perbaikan dalam pada Resntra 2024-2026 dan dokumen pelaporan kinerja ini.

## 2. Rata-Rata Capaian Kinerja Program

Tabel III-6  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Rata-rata Capaian Kinerja Program	100%	88,10%	88,10%

Berdasarkan data dari *aplikasi e-planing* sulsel jumlah capaian kinerja terhadap 4 (empat) program yang dikelola Satuan Polisi pamong Paraja Provinsi Sulawesi selatanyaitu 352,40% sehingga rata-rata capaian adalah 88,10 %, maka kinerja tercapai dengan kriteria **Tinggi**.

Berikut Data Capaian Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi bersumber dari capaian kinerja fisik dalam laporan monitoring realisasi dalam *aplikasi e-planing* sulsel.

Tabel III-7  
Rata-Rata Capaian Kinerja Program

No	Program	Realisasi Capaian Kinerja (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,74
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	99,75
3	Program Penanggulangan Bencana	58,26
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	94,65
<b>Jumlah</b>		<b>352,40</b>
Rata-rata Capaian		88,10

Sumber Data : Aplikasi e-planing sulsel

### 3. Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti

Tabel III-8  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	79,32%	100%	126,07%

Dari data Pokok-pokok Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Prov. Sulsel tanggal 04 April 2024 didapatkan perhitungan bahwa dari 19 temuan telah ditindaklanjuti seluruhnya sehingga capaian kinerja Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti adalah 100%, maka capaian kinerja ini 126,07% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Indikator Prosentase Temuan LHP diukur dengan formulasi rumus Nilai temuan LHP yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan di kali 100% dengan sumber data dari auditor yaitu Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan :

Tabel III-9  
Rincian LHP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

No	Temuan	Tanggapan	Keterangan
1	Beberapa Penghuni Asrama Pegawai Satpol PP belum membayar luran Retribusi (Menunggak)	Sudah dilakukan pembayaran lunas	sudah ditindaklanjuti
2	Perjanjian Sewa/Retribusi Pemanfaatan Aset berupa Asrama dan Rumah Dinas belum dibuat	Sudah dibuat	sudah ditindaklanjuti

3	Asrama Pegawai Satpol PP yang dijadikan sebagai Obyek Pendapatan, kurang layak huni	Telah diusulkan rehab	sudah ditindaklanjuti
4	Terdapat Pertanggung jawaban Belanja yang bukti pendukungnya belum lengkap	Telah dilengkapi	sudah ditindaklanjuti
5	Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan Tupoksi	Sudah dilakukan perbaikan selanjutnya	sudah ditindaklanjuti
6	Terdapat Kelebihan Pembayaran Uang Harian Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) sebesar Rp. 2.220.000	Tidak terjadi kelebihan pembayaran karena uang harian tidak ditanggung panitia	sudah ditindaklanjuti
7	Belanja Alat/Bahan Cetak berupa Cetak Ucapan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 1.150.000	Telah di anggarkan	sudah ditindaklanjuti
8	Pertanggungjawaban Belanja yang tidak didukung dengan Bukti yang lengkap sebesar Rp. 26.343.446	Telah dilengkapi	sudah ditindaklanjuti
9	Tenaga Satpol PP yang diperbantukan/ditugaskan pada UPT Pendapatan Sinjai tidak ditemukan keberadaannya	Sudah ditegur dan sudah aktif kembali bertugas	sudah ditindaklanjuti
10	Penataan Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Belum Tertib	Sudah dilakukan penatausahaan ulang	sudah ditindaklanjuti
11	Surat Pertanggungjawaban Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan belum lengkap	Telah dilengkapi	sudah ditindaklanjuti
12	Terdapat 3 item Perangkat CCTV tidak berfungsi	Sudah diusulkan kembali penganggaran perbaikan	sudah ditindaklanjuti
13	BMD Kondisi Rusak Berat belum diajukan Penghapusan kepada Gubernur	Sudah diusulkan surat penghapusan yang terbaru	sudah ditindaklanjuti
14	Mobil Pemadam yang telah dihibahkan tetapi masih tercatat pada Buku Inventaris	Sudah berkoordinasi BKAD untuk perpindahan aset 2 unit mobil damkar	sudah ditindaklanjuti
15	Buku Pemeliharaan Barang tidak dibuat	Pengurus barang sudah membuat	sudah ditindaklanjuti
16	e-Barang Milik Daerah (e-BMD) Belum Maksimal dimanfaatkan	Sudah dilakukan sosialisasi kepada semua operator bidang	sudah ditindaklanjuti
17	Dokumen Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Tertib dan Lengkap	Sudah dilengkapi	sudah ditindaklanjuti
18	Pengguna Barang tidak melakukan Pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah Rusak Berat	Akan diusulkan perbaikan asrama dan rumah dinas	sudah ditindaklanjuti
19	Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp. 34.683.348,-	Telah dilakukan pengerjaan sehingga volume 100%	sudah ditindaklanjuti

Sumber Data : Pokok-pokok Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Prov. Sulsel tanggal 04 April 2024

#### 4. Prosentase ASN berkinerja baik dan sangat baik

Tabel III-10  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100,42 (nilai)	100 (nilai)	99,58%

Dari data Kepegawaian Satpol PP per 31 Desember 2024 jumlah pegawai dengan nilai SKP sangat baik sebanyak 1 orang dan baik sebanyak 142 orang, maka persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik adalah 143 orang dibagi 143 orang dikali 100% hasilnya 100% (nilai), sehingga capaian kinerja 99,58% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Indikator sasaran Prosentase ASN berkinerja baik dan sangat baik berdasarkan nilai SKP, dihitung dengan formulasi pengukuran Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nilai Baik dan sangat baik dibagi jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan di kali 100 persen. Data rekapitulasi Nilai SKP ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel data di sebagai berikut :

Tabel III-11  
ASN Satpol PP dengan Nilai SKP Kategori Baik

No.	Uraian	Jumlah Orang	Kategori Nilai SKP
1	Eselon II	1	Sangat Baik
2	Eselon III	5	Baik
3	Eselon IV	11	Baik
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	73	Baik
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	53	Baik
<b>TOTAL</b>		<b>143</b>	

Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP per 31 Desember 2024

#### 5. Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

Tabel III-12  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	82,96 (nilai)	80 (nilai)	96,43%

Berdasarkan *aplikasi e-planing sulse* target kinerja untuk indikator Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Program yaitu 82,96 poin nilai dan terealisasi 80 poin nilai, maka capaian kinerja 96,43% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Data Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi bersumber dari laporan monitoring realisasi dalam aplikasi *e-planing sulse*.

Tabel III-13  
Rata-Rata Capaian Kinerja Program

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	82,96 (nilai)	80 (nilai)

*Sumber Data : aplikasi e-planing sulse*

## B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-14  
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan (IKU)	73,50 (BB)	74,60 (BB)	75,45 (BB)
2	Rata-rata Capaian Kinerja Program	-	-	88,10%
3	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100%	100%	100%
5	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100%	100%	80 (nilai)

Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Tahun 2022 yaitu 73,50, Tahun 2023 yaitu 74,60 dan Tahun 2024 yaitu 75,45 dengan kategori BB.

Untuk indikator Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan belum ada pengukuran untuk 2022 sampai 2023, dan untuk tahun 2024 tercapai 88,10%.

Tahun 2022 sampai 2024 Indikator Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti berturut-turut tercapai 100% artinya semua LHP selesai ditindaklanjuti, begitu juga dengan indikator Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik capaian 2022-2024 adalah 100%.

Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program tahun 2022 dan 2023 yaitu 100% dan tahun 2024 sebanyak 80 (nilai).

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dan Standar Nasional

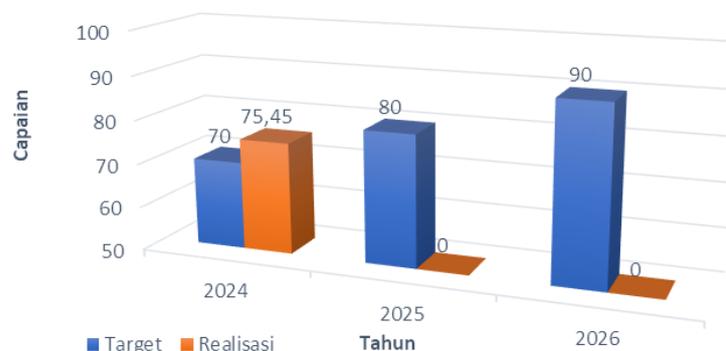
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah, sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-15  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2024	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	BB	AA	-
2	Rata-rata Capaian Kinerja Program	88,10%	100%	-
3	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%	87,05%	-
4	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100 (nilai)	101,43 (nilai)	-
5	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	80 (nilai)	91,47 (nilai)	-

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, realisasi kinerja pada 5 (lima) Indikator Kinerja yang diraih Tahun 2024 ini terlihat pada grafik-grafik berikut :

Grafik III-1  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah  
Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan



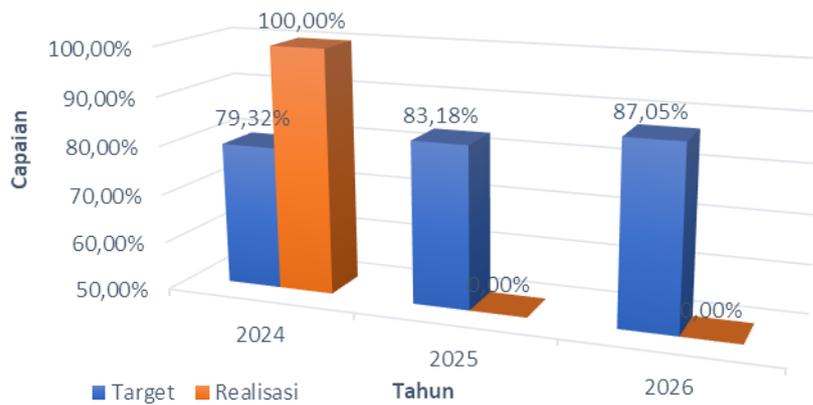
Tahun 2024 Indikator “Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan” memenuhi target yaitu di atas angka 70 poin yaitu 75,45 atau kategori BB, namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang 15 poin.

**Grafik III-2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah**  
**Rata-rata Capaian Kinerja Program**



Jika dibandingkan dengan target jangka menengah indikator “Rata-rata Capaian Kinerja Program” dengan bobot nilai sebesar 88,10% tidak mencapai target pada tahun 2024 maupun target jangka menengah.

**Grafik III-3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah**  
**Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti**



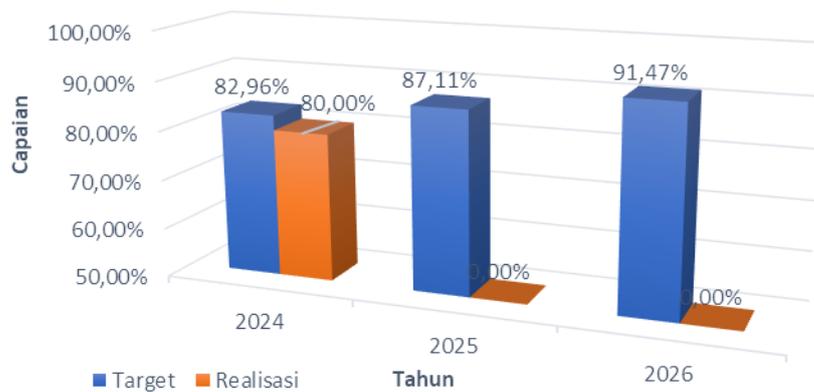
Tahun 2024 Capaian indikator “Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti” dengan target 79,32% terpenuhi 100%, hal ini lebih tinggi daripada target jangka menengah tahun 2026.

**Grafik III-4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah**  
**Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik**



Indikator Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik belum sesuai target tahun 2024 masih kurang 0,42 (nilai) apalagi untuk target tahun 2025 dan jangka menengah tahun 2026.

**Grafik III-5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah**  
**Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program**



Indikator Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program belum sesuai target tahun 2024 masih kurang 2,96 (nilai) apalagi untuk target tahun 2025 dan jangka menengah tahun 2026.

#### **D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

1. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

Faktor Penyebab keberhasilan Indikator ini antara lain :

1. Telah dilakukan perbaikan pada Renstra 2024-2026 dikarenakan tujuan dan sasaran renstra perubahan 2018-2023 yang tidak berkaitan langsung dengan trantibumlinmas.
2. Mengikuti acara sosialisasi Sakip yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel yang dilakukan di Hotel Serathon dan Hotel Aryaduta Makassar
3. Memanfaatkan aplikasi e-sakip sulasel dan ESR kemenpan yang terbaru
4. Melakukan perbaikan pohon kinerja Renstra Perubahan 2018-2023 beserta CSF dan menyempurnakan tujuan, sasaran dan indikatornya pada Renstra 2024-2026

2. Rata-rata Capaian Kinerja Program

Faktor Penyebab keberhasilan Indikator ini antara lain :

1. Koordinasi yang baik antar Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum pada Sekretariat Satpol PP dan Bidang
2. Melakukan monev terhadap kinerja program dengan evaluasi renja triwulanan
3. Melakukan rapat evaluasi kinerja pada akhir tahun

3. Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti

Faktor Penyebab keberhasilan Indikator ini antara lain :

1. Koordinasi yang baik antar Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum pada Sekretariat Satpol PP dan Bidang
2. Melakukan monev terhadap kinerja program dengan evaluasi renja triwulanan
3. Melakukan rapat evaluasi kinerja pada akhir tahun

4. Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik

Faktor Penyebab keberhasilan Indikator ini antara lain :

1. Melakukan monev terhadap kinerja pegawai yang dilakukan oleh sub bagian umum
2. Melakukan rapat evaluasi kinerja berdasarkan SK Tim kerja yang telah dibentuk di awal tahun

5. Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

Faktor Penyebab keberhasilan Indikator ini antara lain :

1. Melakukan monev terhadap kinerja program dengan evaluasi renja triwulanan
2. Melakukan rapat evaluasi kinerja pada akhir tahun

## E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 48.879.336.993,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.663.445.504,00 atau rata-rata 99,56%.

Tabel III-16  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>48.879.336.993,0</b>	<b>48.663.445.504,0</b>	<b>99.56</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.118.800,0	334.364.880,0	99.18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.362.675.197,0	23.326.623.705,0	99.85
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.003.800,0	3.808.600,0	95.12
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.419.949.800,0	1.412.941.000,0	99.51
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	776.940.100,0	761.718.943,0	98.04
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.115.386.538,0	1.054.045.682,0	94.50
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.012.730.658,0	21.007.881.683,0	99.98
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.532.100,0	762.061.011,0	89.60

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2024 unaudited

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” sebesar 102,04% dengan Realisasi Anggaran untuk mendukungnya sasaran tersebut sebesar 99,56% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini adalah sebesar 2,49%.

## **F. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian seperti dibawah ini :

- 1) Sub Bagian Program sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Sub Bagian Keuangan sebanyak 1 (satu) kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Sub Bagian Umum sebanyak 6 (enam) kegiatan dan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
  1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) dan 4 (empat) indikator Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

### A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel III-17  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	100%	100%	100%
2	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (IKU)	100%	100%	100%
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Korban Bencana (IKU)	92%	100%	108,70%
5	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%	100%
6	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate (IKU)	93%	100%	107,53%
7	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	38%	40%	105,26%

#### 1. Presentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)

Tabel III-18  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	100 %	100 %	100 %

Jumlah gangguan tahun 2023 sebanyak 2.767 kasus menurun di tahun 2024 menjadi 1.403 kasus atau terjadi penurunan sehingga target penurunan gangguan trantibum tercapai. Jumlah gangguan 2.767 kasus dikurangi 1.403 kasus dibagi total

jumlah gangguan tahun lalu dikali 100% didapatkan hasil 49,29%. Penurunan terjadi maka hasil capaian adalah 100% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Kejadian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3) tahun 2023 dan 2024 se-Sulawesi Selatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel III-19  
Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum se-Sulawesi Selatan 2023-2024

No	Wilayah	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang diselesaikan		Keterangan
		2023	2024	
1	Provinsi Sulawesi Selatan	92	95	Peringatan/ditertibkan
2	Kabupaten Barru	70	13	Peringatan/ditertibkan
3	Kabupaten Kepulauan Selayar	20	28	Peringatan/ditertibkan
4	Kabupaten Luwu Utara	14	18	Peringatan/ditertibkan
5	Kabupaten Enrekang	15	108	Peringatan/ditertibkan
6	Kabupaten Wajo	43	21	Peringatan/ditertibkan
7	Kabupaten Soppeng	8	5	Peringatan/ditertibkan
8	Kabupaten Bantaeng	36	11	Peringatan/ditertibkan
9	Kabupaten Luwu Timur	378	336	Peringatan/ditertibkan
10	Kabupaten Sinjai	111	10	Peringatan/ditertibkan
11	Kabupaten Bulukumba	105	154	Peringatan/ditertibkan
12	Kota Makassar	350	46	Peringatan/ditertibkan
13	Kabupaten Tana Toraja	64	4	Peringatan/ditertibkan
14	Kabupaten Pinrang	30	18	Peringatan/ditertibkan
15	Kota Palopo	741	21	Peringatan/ditertibkan
16	Kabupaten Gowa	3	7	Peringatan/ditertibkan
17	Kabupaten Toraja Utara	229	29	Peringatan/ditertibkan
18	Kota Parepare	152	90	Peringatan/ditertibkan
19	Kabupaten Maros	86	19	Peringatan/ditertibkan
20	Kabupaten Jeneponto	24	7	Peringatan/ditertibkan
21	Kabupaten Sidenreng Rappang	31	3	Peringatan/ditertibkan
22	Kabupaten Bone	82	1	Peringatan/ditertibkan
23	Kabupaten Takalar	70	359	Peringatan/ditertibkan
24	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0	0	Peringatan/ditertibkan
25	Kabupaten Luwu	13	0	Peringatan/ditertibkan
	<b>Jumlah</b>	<b>2.767</b>	<b>1.403</b>	

Sumber Data: Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kab/Kota se-Sulsel

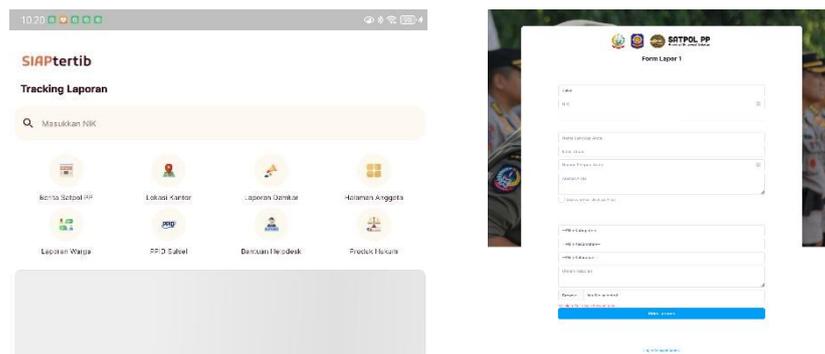
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengintervensi penurunan gangguan trantibum se-Sulawesi Selatan antara lain yaitu Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Urusan Trantibumlinmas Sulsel yang dilaksanakan pada 08 s/d 09 Maret 2024 bertempat di Hotel Four Point by Serathon Makassar untuk sinergi trantibumlinmas tahun 2024 dan Menyaring ide gagasan serta usulan Satpol PP Kabupaten/Kota dan OPD terkait untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Satpol PP Prov. Sulsel Tahun. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Pemberian Piagam Penghargaan Gubernur kepada Satpol PP Kabupaten/Kota terhadap Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Trantibumlinmas terbaik se-Sulsel tahun sebelumnya yaitu untuk Satpol PP Kota Makassar, Satpol PP Kabupaten Pinrang dan Satpol PP kabupaten Tana Toraja untuk memberikan reward agar pelaksanaan SPM yang dilakukan oleh Kabupeten/Kota semakin maksimal.

Gambar 1  
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Urusan Trantibumlinmas Sulsel



*Launching* Aplikasi Siap Tertib Sulsel yaitu Aplikasi berbasis *WEB* dan *Android Mobile* yang bisa akses dan di *install* oleh masyarakat umum sebagai wujud pelayanan SatpolIPP dalam menjangir aduan masyarakat berkaitan dengan Tarntibum-linmas se-Sulawesi Selatan dimana *server* berada di Pemprov. Sulsel, Satpol PP Prov. Sulsel dan Satpol PP Kabupaten/Kota sebagai admin dalam aplikasi tersebut.

Gambar 2  
Aplikasi Siap Tertib Sulsel



Dilakukan juga Launching Jingle Satpol PP yang diinisiasi oleh Satpol PP Prov. Sulsel untuk memberikan inspirasi bagi anggota Satpol PP seluruh Sulawesi Selatan, diharapkan dapat menambah citra baik Satpol PP yang tegas dan humanis oleh Masyarakat.

## 2. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel III-20  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (IKU)	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota bahwa Tingkat Pelanggaran K3 (keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman) di Kabupaten/Kota tahun 2024 sebanyak 1.403 kasus pelanggaran maupun pengaduan dapat diselesaikan semua. Pencapaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 diukur dengan jumlah pelanggaran yang diselesaikan yaitu 1.403 kasus dibagi jumlah pelanggaran yaitu 1.403 kasus dikali 100% hasilnya 100%. Target yang ditetapkan sebesar 100% tercapai. Sehingga capaian 100% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III-21  
Data Pelanggaran Trantibum Kabupaten/Kota se-Sulsel Tahun 2024

No	Wilayah	Jumlah Pelanggaran & Pengaduan Trantibum yang Masuk	Jumlah Pelanggaran & Pengaduan Trantibum yg diselesaikan	Tindakan yang diambil
1	Provinsi Sulawesi Selatan	95	95	Peringatan/ditertibkan
2	Kabupaten Barru	13	13	Peringatan/ditertibkan
3	Kabupaten Kepulauan Selayar	28	28	Peringatan/ditertibkan
4	Kabupaten Luwu Utara	18	18	Peringatan/ditertibkan
5	Kabupaten Enrekang	108	108	Peringatan/ditertibkan
6	Kabupaten Wajo	21	21	Peringatan/ditertibkan
7	Kabupaten Soppeng	5	5	Peringatan/ditertibkan
8	Kabupaten Bantaeng	11	11	Peringatan/ditertibkan
9	Kabupaten Luwu Timur	336	336	Peringatan/ditertibkan
10	Kabupaten Sinjai	10	10	Peringatan/ditertibkan

11	Kabupaten Bulukumba	154	154	Peringatan/ditertibkan
12	Kota Makassar	46	46	Peringatan/ditertibkan
13	Kabupaten Tana Toraja	4	4	Peringatan/ditertibkan
14	Kabupaten Pinrang	18	18	Peringatan/ditertibkan
15	Kota Palopo	21	21	Peringatan/ditertibkan
16	Kabupaten Gowa	7	7	Peringatan/ditertibkan
17	Kabupaten Toraja Utara	29	29	Peringatan/ditertibkan
18	Kota Parepare	90	90	Peringatan/ditertibkan
19	Kabupaten Maros	19	19	Peringatan/ditertibkan
20	Kabupaten Jeneponto	7	7	Peringatan/ditertibkan
21	Kabupaten Sidenreng Rappang	3	3	Peringatan/ditertibkan
22	Kabupaten Bone	1	1	Peringatan/ditertibkan
23	Kabupaten Takalar	359	359	Peringatan/ditertibkan
24	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0	0	Peringatan/ditertibkan
25	Kabupaten Luwu	0	0	Peringatan/ditertibkan
	<b>Jumlah</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>	

Sumber Data: Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kab/Kota se-Sulsel

Berikut adalah rangkuman data pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tabel III-22  
Data Pelaksanaan Kegiatan Trantibumm Satpol PP Prov. Sulsel 2024

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Penanganan Unras dan Kerusuhan Massa	4	4	1	2	11	5	2	0	5	5	3	0	42
2	Penertiban	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
3	Patroli	5	5	8	8	3	13	6	0	2	4	2	2	58
4	Pengamanan	17	20	28	30	26	25	23	25	19	34	30	18	295
5	Pembinaan (pelatihan2)	1	7	4	5	17	5	5	6	9	3	6	1	69
6	Penyuluhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Deteksi dan Cegah Dini	20	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	205
8	Pengawasan Perda/Perkada	2	3	0	3	3	5	11	4	2	7	10	1	51
9	Penegakan Perda/Perkada	5	6	2	1	0	0	0	0	0	2	12	3	31

10	Pendataan Linmas	5	2	3	1	3	2	1	0	0	0	0	0	17
11	Pemberdayaan Linmas	5	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	11

*Sumber Data: Data Sektoral Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan*

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah dilakukan dengan kegiatan berupa rapat Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (refocusing) dan dilakukan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi trantibum di beberapa kabupaten/kota oleh bidang trantib. Dilakukan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat namun dokumennya belum sepenuhnya selesai. Pengadaan sarpras trantibum berupa laptop untuk mendukung kinerja bidang trantib.

Dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilakukan dengan kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. Deteksi dini atau cegah dini dilakukan dengan menugaskan anggota satpolpp di Lokasi-loaksi akan berlangsungnya demonstrasi bertujuan untuk memberikan informasi lengkap agar dapat dilakukan tindakan antisipasi terhadap kegiatan yang mungkin akan berdampak pada gangguan trantibum. Melakukan Patroli Rutin Trantibum bersama PRC (Pasukan Reaksi Cepat) Satpol PP baik patrol rutin mingguan maupun patrol saat perayaan hari besar keagamaan dan cipta kondisi trantibum seperti pada W-Super Club serta Patroli Gabungan bersama Satpol PP Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.

Gambar 3  
Pelaksanaan Patroli



Melakukan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada dengan pelaksanaan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Dilakukan Penertiban di di Kawasan Lego-Lego (CPI) di jalan-jalan wilayah kewenangan provinsi seperti Jl. Ap Pettarani Jl. Urip Sumoharjo Jl. Hertasing dan sebagainya.

Gambar 4  
Pelaksanaan Penertiban



Pelaksanaan Pengamanan Unjuk Rasa / Pengendalian Massa dilakukan pada lingkup kantor gubernur sulsel dan kantor pemerintah provinsi sulsel yang didatangi pendemo. Tim Wasdin-Deteksi Dini dan Trantibum diturunkan untuk melakukan deteksi dini dan pemetaan kemungkinan kerusuhan massa saat demo sehingga pengamanan dapat dimaksimalakan sehingga tertib dan aspirasi Masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

Gambar 5  
Pelaksanaan Pengamanan/Pengendalian Massa



Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia berupa Pembinaan Fisik yaitu lari Bersama dan olahraga Bersama tiap sore hari, Pelatihan Baris Berbaris (PBB), Latihan Beladiri , Latihan PATAKA dan pembinaan mental spiritual berupa pelaksanaan pengajian bersama di Ruang Pola Kantro Gubernur Sulsel.

Gambar 6  
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM



Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Satlinmas serta monitoring anggota satlinmas dalam rangka penguatan anggota Linmas serta persiapan pilkada di beberapa Kabupaten/ Kota dan sosialisasi untuk Memaksimalkan SIM (sistem informasi) LINMAS dan pemakaian atribut baru anggota satlinmas.

Gambar 7  
Pendataan dan Pemberdayaan Linmas



Satpol PP prov Sulsel juga melakukan rapat bersama dalam rangka persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan melakukan peninjauan tempat pemungutan suara (TPS) di beberapa lokasi Kab/Kota.

Gambar 8  
Pemantauan Pemilu dan Pilkada 2024



Melakukan Pembahasan Perjanjian Kerjasama antar OPD dengan BNN dan Pemasangan Surat Edaran Larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan perkusor Narkotika di tempat-tempat tugas Satpol PP provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 9  
Rapat Perlindungan Masyarakat dan tindak lanjut kegiatan



### 3. Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada (SPM)

Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada tidak terlepas dari Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tabel III-23  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada (SPM)	100 %	100 %	100 %

. Berikut data warga yang terdampak dari penegakan perda :

Tabel III-24  
Data warga terdampak penegakan Perda/Perkada

No	Indikator Kinerja	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Warga negara di radius 50 meter dari lokasi penegakan perda	399	data awal
2	Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan	0	Warga yang terkena dampak saat penegakan perda/perkada
3	Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani	0	Warga yang terkena dampak penegakan yang berhak mendapat ganti rugi maupun biaya pengobatan

Sumber Data: Kertas Kerja Laporan SPM dalam aplikasi SPM Bangda

Perhitungan indikator Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada (SPM) yaitu dengan rumus Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani dibagi Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan) di kali 100%. Berdasarkan tabel di atas dikarenakan jumlah warga negara terdampak dan jumlah yang berhak mendapat layanan sama (tidak ada warga yang terdampak dari penegakan perda/perkada) maka capaian indikator "Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada (SPM)" adalah 100%.

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja tabel di atas maka realisasi capaian kinerjanya yaitu 100%, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Kegiatan penegakan perda/perkada yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur antara lain yaitu pemberian Pemahaman tentang Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis pemanfaatan pajak rokok kepada satpol pp kabupaten kota untuk lebih memaksimalkan penggunaan dana pajak rokok yang dikakukan oleh satpolpp. Contoh Melakukan Monitoring Penggunaan Dana Pajak Rokok Bidang Penegakan Hukum pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone.

Gambar 10  
Sosialisasi dan Monitoring Penegakan Peraturan Daerah



Dilaksanakan sosialisasi tentang Tertib Pendidikan dan KTR pada Sekolah - sekolah SMA-SMK dengan tagline **"Satpol Goes To School"** sebagai perwujudan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda No 2 Tahun 2021 tentang ketentramn dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat dan pergub nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah di wilayah SMA/SMK di kab/kota Sulawesi Selatan.

Gambar 11  
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021



Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilakukan dengan melakukan Pengawasan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) pada OPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 12  
Pengawasan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015



Melakukan pengawasan penegakan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yaitu "Tertib Jalan" Dilakukan oleh Anggota Satpol PP di lakukan di jalan-jalan provinsi seperti di Bundaran Simpang Lima Bandara, Jl. Urip Sumoharjo dan Jl. AP Pettarani.

Gambar 13  
Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021



Dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada ditugaskan Satpol PP mengikuti Diklat PPNS di Megamendung yaitu Diklat Manajem PPNS 200 JP diikuti KasatpolIPP Prov. Sulsel dan Diklat Pembentukan PPNS 300 JP diikuti Pejabat Fungsional Satpol PP. Sehingga saat ini Satpol PP Prov. Sulsel memiliki 9 orang PPNS.

Gambar 14  
Pengikutsertaan Diklat PPNS



Pembentukan Sekretariat PPNS dilakukan dengan memperbaharui SK kepengurusan PPNS di Satpol PP dengan di tambah dukungan Operasional untuk memperkuat Sekretariat PPNS guna memaksimalkan peran PPNS di Satpol PP prov. Sulsel dan rencana tahun 2025 akan di Launching E-PPNS sebagai sarana Penegakan Hukum.

Penegakan perda dan perkara se-Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, berikut data penegakan perda Kab/Kota se-Sulawesi Selatan :

Tabel III-25  
Data Penegakan Perda Se-Sulawesi Selatan

No	Wilayah	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani	Keterangan
1	Provinsi Sulawesi Selatan	101	101	
2	Kabupaten Barru	13	13	
3	Kabupaten Kepulauan Selayar	28	28	
4	Kabupaten Luwu Utara	18	18	
5	Kabupaten Enrekang	108	108	
6	Kabupaten Wajo	21	21	
7	Kabupaten Soppeng	5	5	
8	Kabupaten Bantaeng	11	11	
9	Kabupaten Luwu Timur	336	336	
10	Kabupaten Sinjai	10	10	
11	Kabupaten Bulukumba	154	154	
12	Kota Makassar	46	46	
13	Kabupaten Tana Toraja	4	4	
14	Kabupaten Pinrang	18	18	
15	Kota Palopo	21	21	
16	Kabupaten Gowa	7	7	
17	Kabupaten Toraja Utara	29	29	
18	Kota Parepare	90	90	
19	Kabupaten Maros	19	19	
20	Kabupaten Jeneponto	7	7	
21	Kabupaten Sidenreng Rappang	3	3	
22	Kabupaten Bone	1	1	
23	Kabupaten Takalar	359	359	
24	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0	0	

25	Kabupaten Luwu	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	

Sumber Data: Data dan Informasi Satpol PP Prov Sulsel

Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menyelesaikan seluruh kasus yaitu sebanyak 1.409 kasus pelanggaran Perda atau 100% kasus tersebut tertangani.

#### 4. Persentase Penurunan Korban Bencana

Tabel III-26  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Korban Bencana	92%	100%	108,70%

Persentase Penurunan Korban Bencana terealisasi 100% sehingga realisasi capaian kinerja yaitu 100%, capaian kinerja tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Perhitungan indikator kinerja Persentase Penurunan Korban Bencana yaitu Jumlah Korban Bencana tahun Lalu dikurangi Jumlah Korban Bencana Tahun Berjalan dibagi Jumlah Korban Bencana tahun Lalu dikali 100% sehingga hasilnya 36,72%. Penurunan terjadi maka hasil capaian adalah 100% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel III-27  
Data Jumlah Korban Bencana Se-Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Kejadian Bencana	Korban Jiwa						Jumlah
		Meninggal	Luka/Sakit	Hilang	Tenggelam	Terdampak	Pengungsi	
1	Januari	-	-	-	-	61	9	70
2	Februari	5	3	19	2	29.344	109	29.482
3	Maret	3	1	1	-	696	66	767
4	April	-	1	2	2	591	20	616
5	Mei	4	5	4	6	310	204	533
6	Juni	2	-	-	-	400	-	402
7	Juli	3	1	-	1	2.797	3	2.805
8	Agustus	1	2	-	-	611	3	617
9	September	6	6	-	-	368.073	9	368.094
10	Oktober	8	13	-	-	165.340	25	165.386

11	November	2	6	-	-	219.536	23	219.567
12	Desember	4	1	-	-	127	-	132
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>787.886</b>	<b>471</b>	<b>788.471</b>

Sumber Data: BPBD Prov. Sulsel

Tabel III-28  
Data Jumlah Korban Bencana Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Kejadian Bencana	Korban Jiwa						Jumlah
		Meninggal	Luka/Sakit	Hilang	Tenggelam	Terdampak	Pengungsi	
1	Januari	-	5	-	-	701	15	721
2	Februari	9	18	-	-	933	-	960
3	Maret	6	4	1	-	4.900	126	5.037
4	April	22	11	-	-	27.686	1.683	29.402
5	Mei	19	2	1	-	71.010	2.772	73.804
6	Juni	-	-	-	-	1.118	41	1.159
7	Juli	2	2	-	-	40.831	251	41.086
8	Agustus	4	3	-	-	36.563	47	36.617
9	September	-	1	-	-	1.216	-	1.217
10	Oktober	1	1	-	-	845	43	890
11	November	10	15	-	-	1.730	-	1.755
12	Desember	4	3	1	-	304.940	1.373	306.321
	<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>492.473</b>	<b>6.351</b>	<b>498.969</b>

Sumber Data: BPBD Prov. Sulsel

Penurunan Korban bencana tidak secara langsung merupakan kontribusi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, namun dengan melakukan kegiatan yang berkontribusi dalam kegiatan kebencanaan berupa Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana menghasilkan dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 5. Persentase Korban Bencana yang tertangani

Tabel III-29  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%	100%

Persentase Korban Bencana yang tertangani pada tahun 2024 adalah 100% sehingga realisasi capaian kinerja yaitu 100%, capaian kinerja tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Jumlah Korban Bencana Tahun 2024 adalah 498.969 orang, tertangani semua berdasarkan pendataan. Maka realisasi indikator kinerja adalah jumlah korban becaa yang tettangani yaitu 498.969 orang dibagi Jumkah Korban Bencana yaitu 498.969 orang dikali 100% hasilnya 100%.

Berikut data jumlah korban bencana se-Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang dirangkum dari data BPBD Provinsi Sulawesi Selatan :

Tabel III-30  
Data Jumlah Korban Bencana Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Kejadian Bencana	Jumlah Korban Bencana	Jumlah yang tertangani	Keterangan
1	Januari	721	721	
2	Februari	960	960	
3	Maret	5.037	5.037	
4	April	29.402	29.402	
5	Mei	73.804	73.804	
6	Juni	1.159	1.159	
7	Juli	41.086	41.086	
8	Agustus	36.617	36.617	
9	September	1.217	1.217	
10	Oktober	890	890	
11	November	1.755	1.755	
12	Desember	306.321	306.321	
	<b>Jumlah</b>	<b>498.969</b>	<b>498.969</b>	

Sumber Data: BPBD Prov. Sulsel

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan yang berkontribusi dalam kegiatan kebencanaan yaitu Layanan Informasi Rawan Bencana berupa kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana berupa Pelatihan

Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana.

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana berupa Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana menghasilkan dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana).

## 6. Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate

Persentase Tingkat waktu tanggap (*Respon Time Rate*) adalah waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran tidak lebih 15 menit sejak waktu diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat.

Tabel III-31  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	93 %	100%	107,53 %

Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate dihitung dari Jumlah Kejadian Kebakaran yang di tindaklanjuti sesuai respon time (dalam WMK) yaitu 2.225 kasus dibagi Jumlah Kejadian Kebakaran dalam WMK yaitu 2.225 kasus dikali 100% sehingga hasilnya 100%. Target 93% terealisasi 100% sehingga capaian 107,53% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Berikut data kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan :

Tabel III-32  
Data Kejadian Kebakaran se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Wilayah	Jumlah Kejadian Kebakaran dalam WMK	Jumlah Kejadian Kebakaran yang di tindaklanjuti sesuai respon time (dalam WMK)	Keterangan
1	Kabupaten Barru	94	94	
2	Kabupaten Kepulauan Selayar	59	59	
3	Kabupaten Luwu Utara	23	23	
4	Kabupaten Enrekang	17	17	
5	Kabupaten Wajo	68	68	

6	Kabupaten Soppeng	87	87	
7	Kabupaten Bantaeng	63	63	
8	Kabupaten Luwu Timur	79	79	
9	Kabupaten Sinjai	37	37	
10	Kabupaten Bulukumba	83	83	
11	Kota Makassar	303	303	
12	Kabupaten Tana Toraja	10	10	
13	Kabupaten Pinrang	78	78	
14	Kota Palopo	45	45	
15	Kabupaten Gowa	70	70	
16	Kabupaten Toraja Utara	15	15	
17	Kota Parepare	305	305	
18	Kabupaten Maros	229	229	
19	Kabupaten Jeneponto	59	59	
20	Kabupaten Sidenreng Rappang	132	132	
21	Kabupaten Bone	115	115	
22	Kabupaten Takalar	153	153	
23	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	48	48	
24	Kabupaten Luwu	53	53	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	

*Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Kab/Kota se-Sulsel*

Dapat dilihat dari tabel di atas juga bahwa dari 2.225 kasus kebakaran seluruhnya ditindaklanjuti sesuai respon time. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat dalam rangka terus memaksimalkan pencapaian respon time damkar yang dilakukan oleh Bidang Linmas dan Damkar. Dilakukan pemberian hibah mobil damkar untuk Kabupaten Luwu Utara pada bulan Januari dan Kabupaten Wajo pada bulan Februari 2024.

Gambar 15  
Rapat terkait Pencapaian Respon Time Kebakaran dan Penyerahan Mobil Damkar



## 7. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase pos pelayanan bencana kebakaran diukur dengan membagi luas wilayah dengan formula 7,5 km jari-jari. Atau dengan kata lain luas wilayah dibagi 176 km. provinsi Sulawesi selatan dengan luas wilayah 46.717,28 km<sup>2</sup> harus tersedia sebanyak 265 pos pelayanan bencana kebakaran. Tahun 2024 ditargetkan sebesar 38% atau 101 pos pelayanan yang ada di kabupaten/kota tergantung luas wilayah kabupaten/kota dimaksud.

Tabel III-33  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	38 %	40 %	105,26 %

Target sebesar 38 % tercapai di tahun 2024 tercapai karena sudah terdapat 106 pos pelayanan kebakaran di Kab/Kota se-Sulawesi Selatan, sehingga capaian kinerja 105,26% atau dengan kriteria sangat tinggi.

Berikut data pos layanan kebakaran di Sulawesi Selatan :

Tabel III-34  
Pos Pelayanan Kebakaran Kabupaten/kota

No	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH	POS PELAYANAN KEBAKARAN		KET
			STANDAR NASIONAL 7,5 Km	2024	
1	Makassar	175,8 km <sup>2</sup>	1	8	
2	Gowa	1.883 km <sup>2</sup>	11	2	
3	Takalar	566,5 km <sup>2</sup>	3	4	
4	Jeneponto	749,8 km <sup>2</sup>	4	2	
5	Bantaeng	395,8 km <sup>2</sup>	2	4	
6	Bulukumba	1.155 km <sup>2</sup>	7	5	
7	Kep. Selayar	1.357 km <sup>2</sup>	8	4	
8	Sinjai	820 km <sup>2</sup>	5	3	
9	Bone	4.559 km <sup>2</sup>	26	8	
10	Soppeng	1.557 km <sup>2</sup>	9	8	
11	Wajo	2.506 km <sup>2</sup>	14	6	
12	Pare-Pare	99,33km <sup>2</sup>	1	2	
13	Sidrap	1.883 km <sup>2</sup>	11	5	
14	Enrekang	1.786 km <sup>2</sup>	10	2	
15	Tator	2.054 km <sup>2</sup>	12	2	
16	Toraja Utara	1.151 km <sup>2</sup>	7	1	
17	Palopo	247,52 km <sup>2</sup>	2	3	
18	Luwu Utara	7.503 km <sup>2</sup>	43	2	

19	Luwu Timur	6.945 km <sup>2</sup>	40	10	
20	Luwu	2.909 km <sup>2</sup>	16	5	
21	Pinrang	1.962 km <sup>2</sup>	11	3	
22	Barru	1.175 km <sup>2</sup>	7	7	
23	Pangkep	1.112 km <sup>2</sup>	6	3	
24	Maros	1.619 km <sup>2</sup>	9	7	
<b>JUMLAH</b>		<b>46.717.48</b>	<b>265</b>	<b>106</b>	<b>40%</b>

*Sumber Data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kota se-Sulsel*

Dalam Upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sekaligus memaksimalkan pelayanan kebakaran, maka pada akhir tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merancang Kesepakatan Bersama atau MoU antar Kabupaten/Kota perihal kerjasama layanan Damkar Sulawesi Selatan yang dibagi per wilayah kabupaten/Kota yang saling berdekatan. Hal ini bertujuan agar damkar Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dapat melayani secara cepat pada wilayah kabupten/kota sebelahnya berdasar jarak bukan lagi terbatas pada faktor administrasi wilayah.

Dilaksanakannya Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk Pembinaan dan peningkatan ketrampilan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Gambar 16  
Monitoring Sarana Prasaran Damkar di Kab/Kota



Untuk mendukung Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ke beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

## B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Sasaran 2 “Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota” tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk 7 (tujuh) indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-35  
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	100%
2	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	99,59%	100%	100%
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Korban Bencana	-	-	100%
5	Persentase Korban Bencana yang tertangani	-	-	100%
6	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	92,60%	95,23%	100%
7	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	37%	40%	40%

Untuk indikator “Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)”, “Persentase Penurunan Korban Bencana” dan “Persentase Korban Bencana yang tertangani” pada tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan pengukuran sehingga belum ada realisasi kinerja yang terlihat sedangkan untuk tahun 2024 masing-masing tercapai 100%.

Realisasi kinerja indikator “Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” mengalami peningkatan dari tahun 2022 tercapai 99,59% tahun 2023 100% dan tahun 2024 tetap 100%.

Untuk “Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi” tahun 2022 dan 2023 realisasi kinerja diambil dari *aplikasi* SPM Bangda Kemedagri dimana realisasi kinerja masing-masing 100% dan tahun 2024 juga 100%.

Realisasi kinerja indikator “Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate” tahun 2022 adalah 92,60%, tahun 2023 naik menjadi 95,23% dan tahun 2024 target tercapai maksimal menjadi 100%.

Indikator “Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran” tahun 2022 sebesar 37% kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 40% sedangkan tahun 2024 tetap 40%.

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional

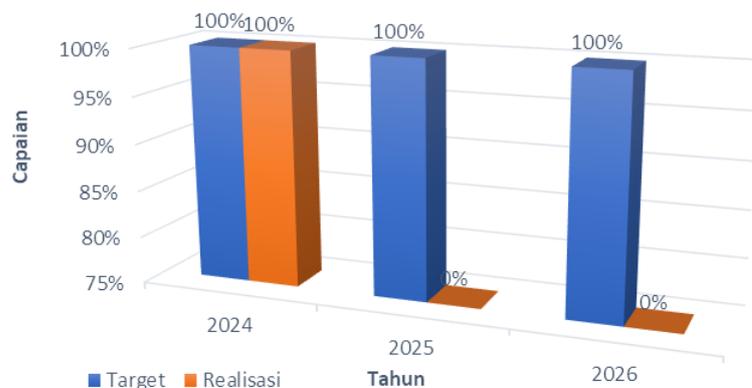
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-36  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2024	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	100%	100%	-
2	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (IKU)	100%	100%	-
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%	-
4	Persentase Penurunan Korban Bencana (IKU)	92%	98%	-
5	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%	-
6	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate (IKU)	100%	94%	-
7	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	40%	39%	-

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, realisasi target berdasarkan 7 (tujuh) indikator yang diraih Tahun 2024 terlihat pada grafik-grafik berikut :

Grafik III-6  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah  
Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)



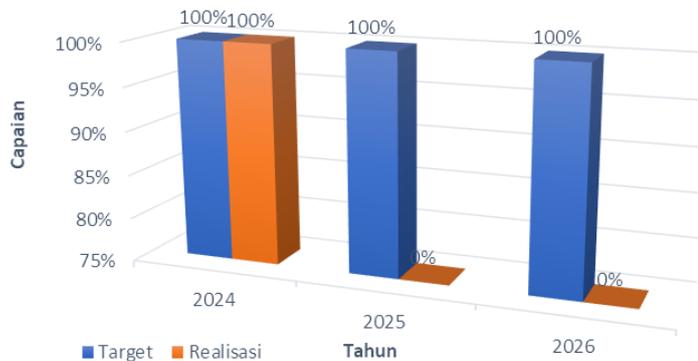
Target penurunan gangguan trantibum tercapai pada tahun 2024, capaian tersebut sama dengan target tahun 2025 maupun target jangka menengah tahun 2026.

**Grafik III-7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah**  
 Presentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3  
 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)



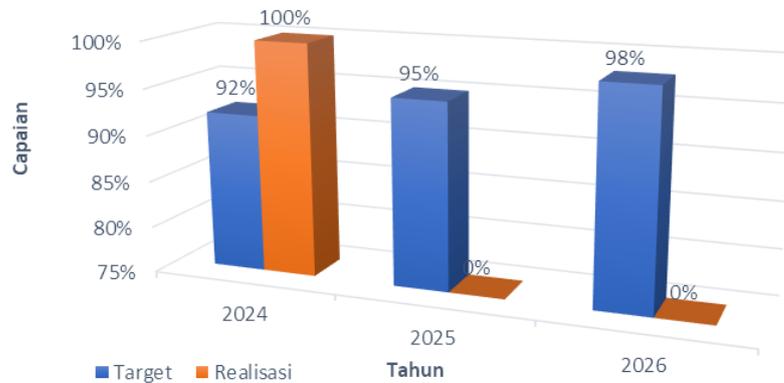
Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator Presentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum) sebesar 100% dan tercapai pada tahun 2024, capaian tersebut sama dengan target jangka menengah.

**Grafik III-8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah**  
 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)



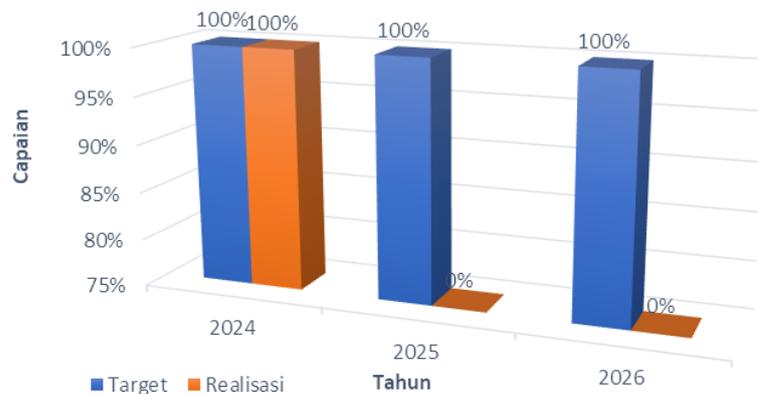
Berdasarkan grafik di atas bahwa realisasi indikator “Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi” tercapai dengan angka 100% capaian tersebut sama dengan target tahun 2024 maupun target jangka menengah.

**Grafik III-9**  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah  
Persentase Penurunan Korban Bencana



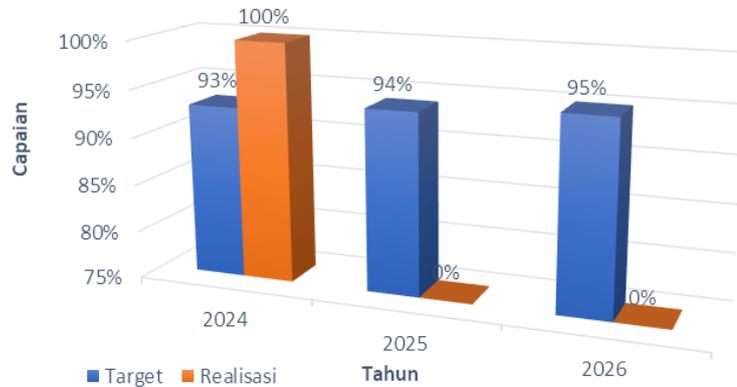
Berdasarkan grafik di atas bahwa realisasi indikator “Persentase Penurunan Korban Bencana” tercapai dengan angka 100% capaian tersebut melampaui target tahun 2024 maupun target jangka menengah.

**Grafik III-10**  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah  
Persentase Korban Bencana yang tertangani



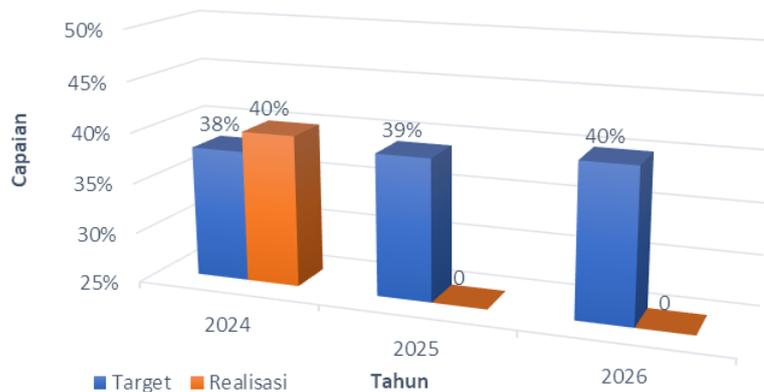
Berdasarkan grafik di atas bahwa realisasi indikator “Persentase Korban Bencana yang tertangani” tercapai dengan angka 100% capaian tersebut sama dengan target tahun 2024 maupun target jangka menengah..

**Grafik III-11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah**  
**Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai**  
**Respon Time Rate**



Berdasarkan grafik di atas bahwa realisasi target indikator “Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate” tahun 2024 adalah 100% melampaui target 93%, hal tersebut masih lebih tinggi dari target jangka menengah 95%.

**Grafik III-12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan Jangka Menengah**  
**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**



Berdasarkan grafik di atas bahwa realisasi target indikator “Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran” tahun 2024 yaitu 40% melampaui target 38% dan capaian tersebut sama dengan target jangka menengah.

#### **D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan**

1. Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)

Faktor Penyebab keberhasilan Indikator ini antara lain :

1. Pelaksanaan Forum OPD trantibumlinmas untuk menyamakan persepsi penyelesaian gangguan trantibumlinmas
2. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan kab/kota untuk penanganan gangguan trantibum

2. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Faktor Penyebab keberhasilan Indikator ini antara lain :

1. Satuan Polisi Pamong Praja selalu menerapkan SOP untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan
2. Bertambahnya PPNS pada satpol pada tahun 2024 menjadi 9 PPNS dan berjalannya sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
3. Aktifnya sosial media Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjawab dan menangani dengan segera aduan masyarakat.
4. Dengan adanya aplikasi Siap Tertib Sulsel maka mempercepat penyampaian aduan masyarakat di Sulsel yang dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Sulawesi Selatan berdasar wilayah masing-masing.

3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)

Faktor Penyebab keberhasilan Indikator ini antara lain :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan selalu menerapkan Sop untuk setiap kegiatan
2. Pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai tupoksi
3. Adanya anggaran yang disediakan sebagai wujud layanan untuk diberikan kepada warga yang terdampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)

4. Persentase Penurunan Korban Bencana

Faktor Penyebab keberhasilan Indikator ini antara lain :

1. Kerjasama dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyingkronkan bentuk kegiatan yang dilakukan karena program yang beririsan agar tidak tumpang tindih pelaksanaannya
  2. Terus dilaksanakan pendataan dan pemberdayaan bagi Satlinmas
5. Persentase Korban Bencana yang tertangani
1. Kerjasama dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyingkronkan bentuk kegiatan yang dilakukan karena program yang beririsan agar tidak tumpang tindih pelaksanaannya
  2. Terus dilaksanakan pendataan dan pemberdayaan bagi Satlinmas
  3. Penguatan Satuan Tugas (Satgas) Linmas yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota

6. Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan mendorong pembuatan MoU antar Kabupaten/Kota yang berdekatan sehingga saat kebakaran terjadi maka Tim Damkar dari lokasi terdekat yang melakukan pemadaman tidak terikat perbedaan wilayah administratif.
2. Melakukan sosialisasi cegah dini terhadap kejadian kebakaran, pemanfaatan apar dan peralatan lainnya.
3. Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.

7. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Adapun penyebab belum tercapainya indikator kinerja ini antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya anggaran untuk sarana dan prasana dalam pembuatan pos-pos pelayanan kebakaran
2. Peralatan yang harus ada dalam pos tersebut membutuhkan biaya pengadaan maupun operasional yang besar

Upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan mendorong pembuatan MoU antar Kabupaten/Kota yang berdekatan sehingga saat kebakaran terjadi maka Tim Damkar dari lokasi terdekat yang melakukan pemadaman tidak terikat perbedaan wilayah administratif;
- 2) Mengupayakan peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana seperti dengan cara menghibahkan aset mobil damkar satpol PP Prov sulsel kepada Kabupaten/Kota yang membutuhkan.

## E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi dihitung dengan rumus persentase capaian kinerja dikurangi persentase realisasi anggaran kemudian dibagi presentase realisasi anggaran selanjutnya di kali 100%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran “Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota” untuk 7 (tujuh) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

### 1. Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 750.739.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 725.118.334,00 atau 96,59%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indicator ini adalah sebesar 3,53%.

Tabel III-37  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
a	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0,0	0,0	0
b	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	581.456.100,0	576.708.034,0	99.18
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	169.283.600,0	148.410.300,0	87.67
	Jumlah	750.739.700,0	725.118.334,0	96,59

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2024 unaudited

Untuk sub kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan terjadi rasionalisasi anggaran sehingga nilainya nol rupiah.

2. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 1.249.408.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.203.293.167,00 atau 96,31%. Dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 3,83%.

Tabel III-38  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
a	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	845.300,0	0,0	0
b	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,0	0,0	0
c	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0,0	0,0	0
d	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	117.355.400,0	115.093.526,0	98,07
e	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	200.661.800,0	197.534.958,0	98,44
f	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	269.169.300,0	267.870.900,0	99,52
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			
a	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	409.974.000,0	408.989.313,0	99,76
b	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	181.094.600,0	156.176.500,0	81,96
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			
a	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	70.308.200,0	57.627.970,0	81,96
b	Pembentukan Sekretariat PPNS	0,0	0,0	0

c	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	0,0	0,0	0
Jumlah		1.249.408.600,0	1.203.293.167,0	96,31

*Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2024 unaudited*

Terdapat rasionalisasi anggaran untuk 4 (empat) sub kegiatan yaitu Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, Pembentukan Sekretariat PPNS dan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS sehingga anggarannya adalah nol rupiah.

3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini terdapat dalam sub kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dilakukan rasionalisasi sehingga sisa anggaran nol rupiha dan realiasi 0%. Namun dikarenakan tidak ada warga yang terkena dampak kegiatan penegakan perda maka tidak ada anggaran yang keluar untuk dibayarkan, sehingga dengan capaian kinerja indikator sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 100%.

Tabel III-39  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
a	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,0	0,0	0,00
Jumlah		0,0	0,0	0,00

*Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2024 unaudited*

#### 4. Persentase Penurunan Korban Bencana

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 13.727.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.900.620,00 atau 93,98%. Dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 108,70%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 16,41%.

Tabel III-40  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	13.727.000,0	12.900.620,0	93,98
	Jumlah	13.727.000,0	12.900.620,0	93,98

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2024 unaudited

#### 5. Persentase Korban Bencana yang tertangani

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 99.377.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.967.600,00 atau 53,30%. Dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 87,62%.

Tabel III-41  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
a	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6.238.600,0	5.763.400,0	92,38
2	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
a	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	93.139.200,0	47.204.200,0	50,68
	Jumlah	99.377.800,0	52.967.600,0	53,30

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2024 unaudited

Terdapat sisa anggaran yang besar pada sub kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana sebesar 47.204.200 dengan realisasi hanya 50,68% dikarenakan SPD kegiatan tersebut tidak terbit.

6. Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate (IKU)

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 23.423.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.107.800,00 atau 94,39%. Dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 107,53%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 13,92%.

Tabel III-42  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			
a	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,00
b	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,00
2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
a	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	23.423.000,0	22.107.800,0	94.39
b	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0,0	0,0	0,00
	Jumlah	23.423.000,0	22.107.800,0	94,39

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2024 unaudited

Terdapat Rasionalisi anggaran terhadap 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sehingga anggarannya nol rupiah.

## 7. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 12.696.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.071.789,00 atau 95,08%. Dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 106,26%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator ini adalah sebesar 10,71%.

Tabel III-43  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			
a	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.696.600,0	12.071.789,0	95.08
	Jumlah	12.696.600,0	12.071.789,0	95,08

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2024 unaudited

## **F. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

### **1. Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :
  - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dilaksanakan oleh Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Trantibum.
  - Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan oleh seksi Operasi dan pengendalian, seksi trantibum Bidang Trantibum dan seksi Kewaspadaan Dini Bidang Binmas.
- 2). Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dilaksanakan oleh seksi pengawasan Bidang Perda.

### **2. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas terdiri dari 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :
  - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
  - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
  - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
  - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan Sub Kegiatan :
- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- 3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan Sub Kegiatan :
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
  - Pembentukan Sekretariat PPNS
  - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Seksi Perlindungan Masyarakat Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi subn kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dengan 1 (satu ) sub kegiatan yaitu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).

4. Persentase Penurunan Korban Bencana

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada seksi Penegakan Perda Bidang Perda.

5. Persentase Korban Bencana yang tertangani

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Seksi Perlindungan Masyarakat pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan masing-masing 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- 2) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

6. Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan oleh Seksi Pemadam Kebakaran pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

7. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan oleh Seksi Pemadam Kebakaran pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

### 3.3. CAPAIAN KINERJA LAIN

#### 1. Penghargaan

Dalam pengelolaan Arsiparis Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan 2 penghargaan yaitu Peringkat ke 2 terhadap hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 dengan nilai audit 78,695 kategori BB (sangat baik) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah Sertifikat sebagai OPD yang aktif dalam Pemeusnahan Arsip serentak di sulwesi selatan dalam rangka hari ajdi Sulawesi selatan yang ke 355 tahun 2024.

Gambar 17  
Penghargaan Arsiparis



Pengharagaan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai apresiasi atas partisipasi dan dedikasi dalam seluruh kegiatan pengembangan Korpri di Sulawesi Selatan.

Gambar 18  
Penghargaan Korpri



## 2. Inovasi

Inovasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

### a. Tim Pasukan Reaksi Cepat (PRC)

Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dibentuk untuk merespons pengaduan masyarakat Terkait Gangguan K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum) dan mem-back up fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penegakan Perda dan Perkada terutama 9 aspek dalam Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Anggota SatpolPP di SK kan setiap tahun untuk bertugas sebagai PRC untuk melakukan patroli maupun menanggapi aduan masyarakat. Dengan adanya PRC ini, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan “10 besar OPD terinovatif” tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 yang lalu.

Gambar 19  
Pasukan Reaksi Cepat (PRC) Satpol PP



### b. Aplikasi Siap Tertib Sulsel

Aplikasi Siap-Tertib akan dibuat pada pertengahan tahun 2023 dengan tujuan untuk menyatukan data trantibum seluruh Sulawesi Selatan serta wadah bagi aduan masyarakat yang berkaitan dengan gangguan trantibum. Aplikasi ini berbasis WEB dan Android Mobile yang bisa akses dan di install oleh masyarakat umum sebagai wujud pelayanan SatpolIPP dalam menjangir aduan masyarakat berkaitan dengan Tarntibum-linmas se-Sulawesi Selatan dimana server berada di Pemprov. Sulsel, Satpol PP Prov. Sulsel dan Satpol PP Kabupaten/Kota sebagai admin dalam aplikasi tersebut.

Aduan yang masuk dari seluruh wilayah provinsi sulawesi selatan baik via aplikasi maupun sosail media akan ditindaklanjti sesuai kewenangan wilayah masing-masing kab/kota. Hal ini sebagai jawaban atas kebutuhan kab/kota yang

belum tersedia aplikasi aduan trantibum, sehingga duan trantibum saat ini menyatu seluruh sulawesi selatan dengan aplikasi tersebut.

Gambar 20  
Aplikasi Siap Tertib Sulsel



c. Pembentukan Danton, Danki, PTI

Danton dan danki mempermudah koordinasi dan pelaksanaan tugas berdasarkan komando dan tim pasukan sehingga pelaksanaan tugas lebih terarah dan efisien. Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 6 Danton dan 2 Danki, termasuk danton Wanita.

Petugas Tindak Internal (PTI) merupakan petugas baik laki-laki maupun perempuan yang bertindak dalam hal pengawasan kedisiplinan internal pegawai maupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Gambar 21  
Danton, Danki dan PTI



### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/11495/X/BKAD tanggal 18 Oktober 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 50.744.306.693,00 terealisasi sebesar Rp. 50.463.043.814,00 atau 99,45 %;
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 284.403.000,00 terealisasi sebesar Rp. 228.861.000,00 atau 80,47 %;

#### 1. Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir Tahun 2024, realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp. 33.120.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.856.400,00 atau sebesar 105,24 %.

#### 2. Aspek Belanja Daerah

Tahun 2024 realisasi Belanja Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 51.028.709.693,00 terealisasi sebesar Rp. 50.691.904.814,00 atau 99,34% dengan membiayai 4 (empat) Program 16 (enam belas) kegiatan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 antara lain meliputi :

1. Terjadi *rasionalisasi* anggaran.
2. Pergeseran anggaran kas yang dilakukan secara mendadak dikarenakan rasionalisasi anggaran
3. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan SPD yang keluar.

Solusi :

1. Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan jadwal penggunaan anggaran dan menghindari adanya penambahan volume pekerjaan dalam APBD Perubahan
2. Memaksimalkan permintaan SPD sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan/anggaran kas.

# BAB IV

## PENUTUP

1. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja
2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV-1  
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	102,04 %	SANGAT TINGGI
1	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan (IKU)	100%	Sangat Tinggi
2	Rata-rata Capaian Kinerja Program	88,10%	Tinggi
3	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	126,07%	Sangat Tinggi
4	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	99,58%	Sangat Tinggi
5	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	96,43%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota	103,07 %	SANGAT TINGGI
1	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	100%	Sangat Tinggi
2	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (IKU)	100%	Sangat Tinggi
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	Sangat Tinggi
4	Persentase Penurunan Korban Bencana (IKU)	108,70%	Sangat Tinggi
5	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	Sangat Tinggi
6	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate (IKU)	107,53%	Sangat Tinggi
7	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	105,26%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		102,56 %	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) capaian kinerja dengan kriteria Tinggi yaitu “Rata-rata Capaian Kinerja Program” dengan capaian 88,10%, untuk kinerja

lainnya tercapai dengan kriteria Sangat Tinggi. Rata-rata capaian kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” adalah 102,04%. Rata-rata capaian kinerja Sasaran 2 “Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota” 103,07% sehingga rata-rata capaian untuk seluruh indikator adalah 102,56% atau dengan kriteria Sangat Tinggi.

## 4.2 LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja cerdas dan komitmen seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, maupun pihak pihak terkait lainnya yang langsung maupun tidak secara langsung memberikan kontribusi dalam rangka memenuhi Tujuan dan Sasaran dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang akuntabel sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas kinerja institusi dalam mengupayakan perbaikan dimasa datang. Untuk itu dilakukan beberapa langkah langkah strategis, antara lain:

- a) Strategi realisasi perencanaan kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2024
- b) Strategi aparatur, diarahkan pada peningkatan kapabilitas aparatur, kualitas sumber daya manusia sesuai isu strategis satuan Polisi pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
- c) Strategi peningkatan sarana dan prasarana sesuai sumber daya yang tersedia, diarahkan pada prioritas pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada secara rutin dan berkala.

Makassar,      Februari 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sulawesi Selatan

Ttd.

ANDI ARWIN AZIS S.STP., M.M  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19760105 199511 1 001

# LAMPIRAN



LAMPIRAN 1  
Perjanjian Kinerja Eselon II



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Arwin Azis, S.STP., MM  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si  
Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Selatan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, ... Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si

**Pihak Pertama,**  
KEPALA SATUAN

ANDI ARWIN AZIS, S.STP., MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	BB
2	Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100%
		Persentase Penurunan Korban Bencana	100%
		Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	100%

**Program/Kegiatan**

**Anggaran**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	47.222.261.907,00
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	2.883.828.200,00
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp.	315.699.600,00
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	130.225.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>50.552.015.007,00</b>

Makassar, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**Dr. BAHTIAR BAHAREDDIN, M.Si**

**Pihak Pertama,**

KEPALA SATUAN

**ANDI ARWIN AZIS, S.STP., MM**

**LAMPIRAN 2**  
**Surat Keputusan Penetapan IKU**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 289 Makassar 90231 - Telp./Faks. 0411-453105

Laman : <https://satpolpp.sulselprov.go.id>, surel : [satpol@sulselprov.go.id](mailto:satpol@sulselprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 12.1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/II/Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum;
12. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

13. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah;
- KEDUA** : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal Januari 2024



**KEPALA,**

**ANDI ARWIN AZIS, S.STP., MM**

Pangkat Pembina Utama Madya

NIP 19760105 199511 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Sulsel di Makassar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 12.1 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Januari 2024

TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026

1. Nama Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
  - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh APIP	Sekretariat

2	Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana dan Bencana Daerah Kebakaran Kab/Kota	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Trantibum}} \times 100 \%$	Bidang Trantib, Bidang Perda & Bidang Binmas Bidang Linmas dan Damkar
		Persentase Penurunan Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Tahun Lalu} - \text{Jumlah Korban Bencana Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Korban Bencana Tahun Lalu} + \text{Jumlah Korban Bencana Tahun Berjalan}} \times 100 \%$	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
		Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100 \%$	



KEPALA,

**ANDI ARWIN AZIS, S.STP., MM**  
Pangkat Pembina Utama Madya  
NIP. 19760105 199511 1 001

### LAMPIRAN 3

#### Realisasi Anggaran Per Sasaran

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI				SISA DANA
				KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
	TOLAK UKUR	TARGET		(Rp)	(%)			
Satuan Polisi Pamong Praja			51.028.709.693,0	50.691.904.814,0	99.34		99.65	336.804.879,0
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100.42 Nilai	48.879.336.993,0	48.663.445.504,0	99.56	98.00	99.74	215.891.489,0
	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	82.96 Nilai				80.00		
	Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	79.32 %				76.00		
<b>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>337.118.800,0</b>	<b>334.364.880,0</b>	<b>99.18</b>	<b>11.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2.753.920,0</b>
1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	206.663.600,0	206.563.600,0	99.95	12.00	100.00	100.000,0
1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.881.400,0	8.881.400,0	100.0 0	1.00	100.00	0,0
1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	28.050.700,0	26.720.580,0	95.26	1.00	100.00	1.330.120,0
1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.212.400,0	20.201.400,0	99.95	1.00	100.00	11.000,0
1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.964.900,0	11.964.900,0	100.0 0	1.00	100.00	0,0
1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	51.325.800,0	50.013.000,0	97.44	1.00	100.00	1.312.800,0
1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.020.000,0	10.020.000,0	100.0 0	4.00	100.00	0,0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>32 Laporan</b>	<b>23.362.675.197,0</b>	<b>23.326.623.705,0</b>	<b>99.85</b>	<b>32.00</b>	<b>99.99</b>	<b>36.051.492,0</b>
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	23.253.787.597,0	23.220.612.031,0	99.86	12.00	100.00	33.175.566,0
1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	60.796.100,0	58.152.374,0	95.65	11.00	95.70	2.643.726,0
1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.490.100,0	1.476.400,0	99.08	1.00	100.00	13.700,0

1.05.01.1.02.0006	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	3.430.800,0	3.429.300,0	99.96	20.00	100.00	1.500,0
1.05.01.1.02.0007	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	43.170.600,0	42.953.600,0	99.50	18.00	100.00	217.000,0
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah</b>	<b>300 Unit</b>	<b>4.003.800,0</b>	<b>3.808.600,0</b>	<b>95.12</b>	<b>300.00</b>	<b>95.50</b>	<b>195.200,0</b>
1.05.01.1.03.0001	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.003.800,0	3.808.600,0	95.12	2.00	95.50	195.200,0
1.05.01.1.03.0002	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen				0.00		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>350 Laporan</b>	<b>1.419.949.800,0</b>	<b>1.412.941.000,0</b>	<b>99.51</b>	<b>346.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7.008.800,0</b>
1.05.01.1.05.0002	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148 Paket	1.388.359.500,0	1.382.450.500,0	99.57	148.00	100.00	5.909.000,0
1.05.01.1.05.0003	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	148 Dokumen	31.590.300,0	30.490.500,0	96.52	148.00	100.00	1.099.800,0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum</b>	<b>250 Unit</b>	<b>776.940.100,0</b>	<b>761.718.943,0</b>	<b>98.04</b>	<b>150.00</b>	<b>98.28</b>	<b>15.221.157,0</b>
	<b>Jumlah Tamu Yang difasilitasi</b>	<b>120 Orang</b>				<b>120.00</b>		
1.05.01.1.06.0001	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	15.112.700,0	15.049.000,0	99.58	50.00	100.00	63.700,0
1.05.01.1.06.0002	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	16.374.100,0	4.911.500,0	30.00	50.00	30.00	11.462.600,0
1.05.01.1.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	180 Paket	25.826.000,0	24.860.000,0	96.26	180.00	100.00	966.000,0
1.05.01.1.06.0006	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.210.000,0	8.950.000,0	97.18	12.00	100.00	260.000,0
X.XX.01.1.06.0008	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	41.365.000,0	41.204.000,0	99.61	12.00	100.00	161.000,0
1.05.01.1.06.0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	626.162.600,0	623.954.743,0	99.65	120.00	99.70	2.207.857,0
1.05.01.1.06.0010	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	2.724.700,0	2.724.700,0	100.00	200.00	100.00	0,0
1.05.01.1.06.0011	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	40.165.000,0	40.065.000,0	99.75	1.00	100.00	100.000,0
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>9 Unit</b>	<b>1.115.386.538,0</b>	<b>1.054.045.682,0</b>	<b>94.50</b>	<b>9.00</b>	<b>95.02</b>	<b>61.340.856,0</b>

X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	681.590.338,0	676.374.682,0	99.23	5.00	100.00	5.215.656,0
1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit				0.00		
1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	79.561.000,0	79.450.000,0	99.86	3.00	100.00	111.000,0
1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	149.082.200,0	148.810.000,0	99.82	1.00	100.00	272.200,0
X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	205.153.000,0	149.411.000,0	72.83	10.00	72.90	55.742.000,0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>21.012.730.658,0</b>	<b>21.007.881.683,0</b>	<b>99.98</b>	<b>24.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4.848.975,0</b>
1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.143.000,0	4.143.000,0	100.0 0	12.00	100.00	0,0
1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.008.587.658,0	21.003.738.683,0	99.98	12.00	100.00	4.848.975,0
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>85 Unit</b>	<b>850.532.100,0</b>	<b>762.061.011,0</b>	<b>89.60</b>	<b>70.00</b>	<b>93.52</b>	<b>88.471.089,0</b>
1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	316.636.750,0	246.233.390,0	77.77	21.00	84.00	70.403.360,0
1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	120.647.350,0	103.330.621,0	85.65	9.00	100.00	17.316.729,0
1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	14.180.000,0	14.140.000,0	99.72	28.00	68.30	40.000,0
1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	399.068.000,0	398.357.000,0	99.82	1.00	100.00	711.000,0
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi</b>	<b>100 %</b>	<b>2.000.148.300,0</b>	<b>1.928.411.501,0</b>	<b>96.41</b>	<b>100.0 0</b>	<b>99.75</b>	<b>71.736.799,0</b>
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>100 %</b>	<b>1.169.487.900,0</b>	<b>1.157.207.418,0</b>	<b>98.95</b>	<b>100.0 0</b>	<b>99.57</b>	<b>12.280.482,0</b>
1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen				0.00		

1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	845.300,0			0.00		845.300,0
1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	150 Unit				0.00		
1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	16 Dokumen				0.00		
1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan				0.00		
1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30 Laporan	117.355.400,0	115.093.526,0	98.07	27.00	98.10	2.261.874,0
1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	277 laporan	581.456.100,0	576.708.034,0	99.18	325.0 0	100.00	4.748.066,0
1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	240 Orang	200.661.800,0	197.534.958,0	98.44	240.0 0	99.00	3.126.842,0
1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	45 Laporan	269.169.300,0	267.870.900,0	99.52	58.00	100.00	1.298.400,0
<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Presentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada</b>	<b>100 %</b>	<b>760.352.200,0</b>	<b>713.576.113,0</b>	<b>93.85</b>	<b>100.0 0</b>	<b>100.00</b>	<b>46.776.087,0</b>
1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	169.283.600,0	148.410.300,0	87.67	3.00	100.00	20.873.300,0
1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70 Laporan	409.974.000,0	408.989.313,0	99.76	70.00	100.00	984.687,0

1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	181.094.600,0	156.176.500,0	86.24	31.00	100.00	24.918.100,0
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>8 Orang</b>	<b>70.308.200,0</b>	<b>57.627.970,0</b>	<b>81.96</b>	<b>8.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12.680.230,0</b>
1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	25 Laporan	70.308.200,0	57.627.970,0	81.96	25.00	100.00	12.680.230,0
1.05.02.1.03.0003 Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokuman				0.00		
1.05.02.1.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	20 laporan				0.00		
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			<b>113.104.800,0</b>	<b>65.868.220,0</b>	<b>58.24</b>	<b>50</b>	<b>58.26</b>	<b>47.236.580,0</b>
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>13.727.000,0</b>	<b>12.900.620,0</b>	<b>93.98</b>	<b>50.00</b>	<b>94.00</b>	<b>826.380,0</b>
1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	13.727.000,0	12.900.620,0	93.98	50.00	94.00	826.380,0
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>6.238.600,0</b>	<b>5.763.400,0</b>	<b>92.38</b>	<b>50.00</b>	<b>92.40</b>	<b>475.200,0</b>
1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	6.238.600,0	5.763.400,0	92.38	50.00	92.40	475.200,0
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>93.139.200,0</b>	<b>47.204.200,0</b>	<b>50.68</b>	<b>50.00</b>	<b>50.70</b>	<b>45.935.000,0</b>
1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapannya (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	93.139.200,0	47.204.200,0	50.68	1.00	50.70	45.935.000,0
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</b>	<b>100 %</b>	<b>36.119.600,0</b>	<b>34.179.589,0</b>	<b>94.63</b>	<b>65.00</b>	<b>94.65</b>	<b>1.940.011,0</b>
<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran</b>	<b>50 %</b>	<b>12.696.600,0</b>	<b>12.071.789,0</b>	<b>95.08</b>	<b>40.00</b>	<b>95,10</b>	<b>624.811,0</b>

1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	12.696.600,0	12.071.789,0	95,08	6,00	95,10	624.811,0
1.05.04.1.01.0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang				0,00		
1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Laporan				0,00		
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>cakupan pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran</b>	<b>90 %</b>	<b>23.423.000,0</b>	<b>22.107.800,0</b>	<b>94,39</b>	<b>60,00</b>	<b>94,40</b>	<b>1.315.200,0</b>
1.05.04.1.02.0002 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	23.423.000,0	22.107.800,0	94,39	13,00	94,40	1.315.200,0
1.05.04.1.02.0004 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan				0,00		



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar-Sulawesi Selatan

<http://satpolpp.sulselprov.go.id> | [satpol@sulselprov.go.id](mailto:satpol@sulselprov.go.id) | IG & FB : halosatpolsulsel | Youtube : Satpol TV Sulsel